



DEPARTEMEN AGRIBISNIS
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PROSIDING SEMINAR

Penelitian Unggulan Departemen Agribisnis

Bogor, 7 dan 14 Desember 2011



Editor :

Rita Nurmalina
Wahyu Budi Priatna
Siti Jahroh
Popong Nurhayati
Amzul Rifin

PROSIDING SEMINAR PENELITIAN UNGGULAN DEPARTEMEN AGRIBISNIS

Bogor, 7 dan 14 Desember 2011

EDITOR :

Rita Nurmalina
Wahyu Budi Priatna
Siti Jahroh
Popong Nurhayati
Amzul Rifin

**PROSIDING SEMINAR
PENELITIAN UNGGULAN DEPARTEMEN AGRIBISNIS**
Bogor, 7 dan 14 Desember 2011

TIM PENYUSUN

PENGARAH :

- Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS (Ketua Departemen Agribisnis)
- Dr. Ir. Dwi Rachmina, MS (Sekretaris Departemen Agribisnis)
- Dr. Ir. Anna Fariyanti, MS (Gugus Kendali Mutu FEM - IPB)

EDITOR :

- Ketua : Prof. Dr. Ir. Rita Nurmalina, MS
- Anggota : - Dr. Ir. Wahyu Budi Priatna, M.Si
- Dr. Siti Jahroh
- Ir. Popong Nurhayati, MM
- Dr. Amzul Rifin, SP., MA

TIM TEKNIS :

- Nia Rosiana, SP., M.Si

DESAIN DAN TATA LETAK :

- Hamid Jamaludin M., AMd

Diterbitkan Oleh :

DEPARTEMEN AGRIBISNIS
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Jl. Kamper Wing 4 Level 5 Kampus IPB Dramaga Bogor 16680

Telp/Fax : 0251-8629654

e-mail : depagribisnis@yahoo.com, dep-agribisnis@ipb.ac.id

Website : <http://agribisnis.fem.ipb.ac.id>

ISBN : 978-979-19423-9-3

KATA PENGANTAR

Salah satu tugas dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan penelitian. Dalam rangka mendukung kegiatan penelitian bagi para dosen, Departemen Agribisnis telah melakukan kegiatan Penelitian Unggulan Departemen (PUD) yang dimulai sejak tahun 2011. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi bagi dosen Departemen Agribisnis untuk melakukan kegiatan penelitian sehingga dapat meningkatkan kompetensi di bidangnya masing-masing. Kegiatan PUD tersebut dimulai dari penilaian proposal yang akan didanai dan ditutup oleh kegiatan seminar. Selanjutnya untuk memaksimalkan manfaat dari kegiatan penelitian tersebut, hasil penelitian perlu didiseminasi dan digunakan oleh masyarakat luas. Salah satu cara untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian tersebut adalah dengan menerbitkan prosiding ini.

Prosiding ini berhasil merangkum sebanyak 22 makalah PUD yang telah diseminarkan pada tanggal 7-14 Desember 2011. Secara umum makalah-makalah tersebut dapat dibagi menjadi tiga bidang kajian, yaitu kajian Bisnis (9 makalah), Kewirausahaan (6 makalah), dan Kebijakan (7 makalah). Bidang kajian tersebut sesuai dengan Bagian yang ada di Departemen Agribisnis, yaitu Bagian Bisnis dan Kewirausahaan dan Bagian Kebijakan Agribisnis. Dilihat dari metode analisis yang digunakan, makalah yang terangkum dalam prosiding ini sebagian besar menggunakan analisis kuantitatif. Pesatnya perkembangan teknologi komputasi dan ketersediaan software metode kuantitatif mendorong para peneliti untuk memilih metode analisis tersebut. Ke depan metode analisis kajian bidang Agribisnis perlu diimbangi dengan metode analisis kualitatif.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Rita Nurmalina, MS sebagai ketua tim PUD dan sekaligus sebagai Editor Prosiding ini beserta tim lainnya. Besar harapan kami prosiding ini dapat digunakan dan bermanfaat bukan saja di lingkungan kampus tapi juga bagi masyarakat luas.

Bogor, 1 Februari 2012
Ketua Departemen Agribisnis FEM IPB

Dr.Ir. Nunung Kusnadi, MS

DAFTAR ISI

KAJIAN BISNIS

Risiko Harga Sayuran di Indonesia	1
Anna Fariyanti dan Lusi Fausia	
Analisis <i>Structure Conduct</i> dan <i>Performance</i> Industri Gula Indonesia.....	23
Amzul Rifin, Suharno, dan Rahmat Yanuar	
Analisa Usahatani Tebu Rakyat di Lampung	37
Ratna Winandi Asmarantaka, Lukman Mohammad Baga, Suprehatin, dan Maryono	
Analisis Efisiensi Teknis Usahatani Tebu di Jawa Timur	51
Netti Tinaprilla	
Efisiensi Produksi Padi Sehat dan Non Organik di Kabupaten Bogor	79
Anna Fariyanti, Nunung Kusnadi, Juniar Atmakusuma, dan Narni Farmayanti	
Aplikasi <i>Theory Of Planned Behavior</i> pada Analisis Perilaku Konsumen Beras Organik di Kota Bogor	97
Febriantina Dewi, dan Yusalina	
Pengaruh Kepercayaan dan Komitmen Terhadap Hubungan Kemitraan Antara PT Saung Mirwan dengan Mitra Tani	117
Heny Kuswanti Daryanto, dan Yanti Nuraeni Muflikh	
Analisis Kelayakan Usaha Pembibitan dan Penggemukan Sapi Potong dalam Rangka Swasembada Daging Nasional.....	141
Juniar Atmakusuma, Tintin Sarianti, dan Anita Ristianingrum	
Usahatani Tebu dan Daya Saing Industri Gula Indonesia	159
Ratna Winandi Asmarantaka	

KAJIAN KEWIRAUSAHAAN

Analisis Perilaku Wirausaha Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.....	179
Rachmat Pambudy, Burhanuddin, Wahyu Budi Priatna, dan Nia Rosiana	
Profil dan Peran Wirakoperasi dalam Pengembangan Agribisnis	197
Lukman Mohammad Baga	
Innovation Capacity and Entrepreneurial Orientation : Case Studies of Vegetable Farm Firms in West Java, Indonesia.....	215
Etriya, Victor Scholten, Emiel Wubben, and S.W.F. (Onno) Omta	
Analisis Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan Terhadap Kinerja Wirausaha pada Unit Usaha Kecil Menengah (UKM) Agroindustri di Kabupaten Bogor.....	225
Popong Nurhayati, Tintin Sarianti, Heny Kuswanti Daryanto, dan Yanti Nuraeni Muflikh	

Analisis Karakteristik Wirausaha Petani Padi (Studi Kasus Petani Gapoktan Wangun Jaya, Cianjur)	257
Rachmat Pambudy, Wahyu Budi Priatna, Burhanuddin, Arif Karyadi Uswandi, dan Yeka Hendra Fatika	
Karakteristik dan Kinerja Wirausaha Wanita pada UKM Agroindustri Perikanan di Kabupaten Sukabumi	271
Popong Nurhayati	
KAJIAN KEBIJAKAN	
Pola <i>Spread</i> Harga Gabah dan Beras di Indonesia : Suatu Indikasi Efektivitas Perubahan Kelembagaan Bulog	287
Harianto dan Dina Lianita Sari	
Pengembangan Kualitas Padi Varietas Unggul Hibrida dengan Pendekatan <i>Quality Function Deployment (QFD)</i> di Jawa Barat	307
Rita Nurmalina, Harfiana, dan Agrivinie Rainy Firohmatillah	
Pembentukan Modal: Sumber Pertumbuhan Sektor Pertanian di Indonesia	331
Dwi Rachmina, dan Eva Yolynda Aviny	
Pengaruh Penerapan Bea Keluar <i>Crude Palm Oil (CPO)</i> Terhadap Ekspor dan Harga Domestik	351
Amzul Rifin	
Transmisi Harga Gula Tebu	366
Rita Nurmalina, Harmini dan Nia Rosiana	
Kajian Pembatasan Kredit (<i>Credit Rationing</i>) pada Usahatani Sayuran di Kecamatan Pangalengan Jawa Barat	397
Dwi Rachmina, Netti Tinaprilla, Eva Yolynda Aviny, Feryanto, dan Maryono	
Efektivitas Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus: Gapoktan Mandiri Jaya, Desa Cikarawang, Dramaga, Kabupaten Bogor).....	417
Feryanto	

POLA SPREAD HARGA GABAH DAN BERAS DI INDONESIA: SUATU INDIKASI EFEKTIVITAS PERUBAHAN KELEMBAGAAN BULOG

Oleh:

Hariato¹⁾ dan Dina Lianita Sari²⁾

¹⁾Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB

²⁾Brighten Institute

¹⁾hariato_ipb@yahoo.com

ABSTRACT

The stable and affordable rice price is one of the components that well contributed to the food security in Indonesia. One of the rice problems is related to its price spread, farmers as a rice producer want to get high rice price, and on the other hand consumers want to get low rice price. Government intervention, especially Bulog, is needed in order to maintain a good price for consumers and producers. However, many parties had been expected that this role was decreased. It had been showed by the price spread that increased since 1998. The objectives of this paper are to analyze the price movement of paddy and rice at the farmer, wholesaler, and consumer levels, as well as the type of price spread between paddy and rice in various islands and big cities in Indonesia. As the result, it can be concluded that paddy price at the farmer level is more volatile than rice price at the consumer and wholesaler levels. Moreover, the rice price in the various islands and big cities in Indonesia when Bulog functioned as LPND (1999-2002) was more volatile than the status as Perum (2003-2008). On the other hand, the national paddy price was more stable when Bulog functioned as Perum. It implies that rice policy stands up for the consumers and sellers rather than for the producers or farmers. Price spread between paddy and rice was increasing from time to time, but the price fluctuation during the Perum period was better than LPND period.

Keywords: rice, price spread, Bulog.

ABSTRAK

Harga beras yang stabil merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Intervensi Pemerintah, khususnya Bulog, dibutuhkan untuk membantu menjaga harga, yang di satu sisi harus menguntungkan bagi produsen, tapi di sisi lain juga harus terjangkau bagi konsumen. Namun, banyak pihak yang beranggapan bahwa peran Bulog ini semakin menurun. Hal ini ditunjukkan oleh *spread* harga yang terus meningkat sejak 1998. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pergerakan harga beras, baik di tingkat eceran maupun di tingkat pedagang besar, serta harga gabah di tingkat petani, serta menganalisis pola *spread* antara harga gabah dan harga beras, baik antar waktu (*time series*) maupun antar wilayah (*spatial*). Hasil analisis menunjukkan bahwa fluktuasi yang terjadi pada harga beras grosir dan harga beras eceran lebih kecil dibandingkan dengan fluktuasi yang terjadi pada harga gabah. Lebih jauh, volatilitas harga beras eceran dan grosir di berbagai pulau di Indonesia menunjukkan bahwa harga lebih sering berfluktuasi pada saat Bulog menjalankan fungsinya sebagai LPND (1999-2002) daripada setelah berstatus sebagai Perum (2003-2008). Namun hal sebaliknya terjadi pada harga gabah nasional, yaitu harga lebih stabil pada saat Bulog menjalankan fungsinya sebagai LPND daripada setelah berstatus sebagai Perum. Ini menunjukkan bahwa kebijakan perberasan yang dilakukan pemerintah lebih berpihak kepada konsumen. Pemerintah lebih khawatir terhadap kenaikan harga beras di tingkat konsumen daripada turunnya harga gabah di tingkat petani. Dari hasil analisis pola *spread* antara harga

gabah dan beras di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pola *spread* nominal secara nasional maupun antar wilayah terus meningkat dari waktu ke waktu, namun fluktuasinya lebih baik ketika Bulog berfungsi sebagai Perum daripada saat berfungsi sebagai LPND.

Kata kunci: beras, *spread* harga, Bulog

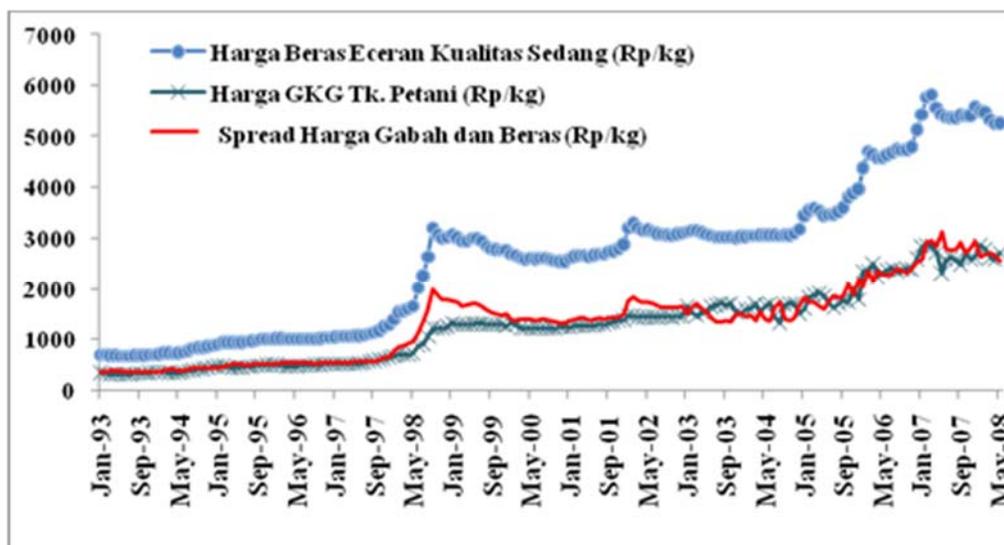
I. PENDAHULUAN

Beras merupakan komoditi strategis yang dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi, sosial bahkan politik. Komoditi beras masih menjadi salah satu komoditi kunci dalam mempengaruhi kestabilan harga-harga umum. Kenaikan harga beras dapat memicu kenaikan harga barang-barang lain. Oleh karenanya komoditi beras senantiasa menjadi perhatian serius pemerintah. Keseriusan ini dapat dilihat dari besarnya intervensi pemerintah dalam perberasan nasional melalui berbagai kebijakan guna menciptakan stabilisasi harga.

Gambar 1 menunjukkan di tingkat pengecer harga gabah dan beras nasional periode Januari 1993-Desember 1997 cenderung stabil, yaitu pada rata-rata Rp 900,7 per kg untuk beras dan Rp 443,4 per kg untuk gabah. Namun pada periode berikutnya, harga beras eceran terus meningkat secara signifikan, dari Rp 1.391,1 per kg pada Januari 1998 menjadi Rp 2.007 per kg pada Juni 1998 (atau meningkat sebesar 44,3 persen), kemudian menjadi Rp 5.267 pada Mei 2008 (atau meningkat sebesar 162,4 persen).

Hal yang sama juga terjadi pada harga Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani. Gabah kering giling didefinisikan sebagai gabah yang mengandung kandungan air maksimum 14 persen, kotoran/hampa maksimum 3 persen, butir hijau/kapur maksimum 5 persen, butir kuning/rusak maksimum 3 persen, dan butir merah maksimum 3 persen. Harga GKG meningkat sebesar 33,2 persen, dari Rp 662,4 per kg pada Januari 1998 menjadi 882,2 per kg pada Juni 1998, kemudian meningkat sebesar 208 persen menjadi Rp 2.545 per kg pada Mei 2008. Walaupun terjadi peningkatan yang cukup besar pada periode Juni 1998-Mei 2008, menarik untuk diperhatikan bahwa harga GKG di tingkat petani relatif lebih fluktuatif pada periode Januari 2003-Mei 2008 dibandingkan pada periode Juni 1998-Desember 2002. Hal tersebut juga menyebabkan *spread* antara harga gabah dan beras pada periode Januari 2003-Mei 2008 lebih fluktuatif dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Fluktuasi harga beras seringkali lebih merugikan petani daripada pedagang karena petani umumnya tidak dapat mengatur waktu penjualannya untuk mendapatkan harga jual yang lebih menguntungkan. Ketidakstabilan harga tersebut, dapat memukul produsen pada musim panen, dan sebaliknya memberatkan konsumen pada musim paceklik. Di samping itu juga akan berakibat luas pada kondisi ekonomi makro khususnya peningkatan inflasi.



Gambar 1. Harga Beras Eceran dan Gabah Kering Giling (GKG) di Tingkat Petani Periode Januari 1993-Mei 2008

Menurut Irawan *et al.*, (2002), pada umumnya harga beras merupakan acuan bagi harga komoditas pangan lainnya dan tingkat upah pertanian, sehingga perubahan harga pangan lain dan upah tenaga kerja cenderung sejalan dengan perubahan harga gabah. Dengan demikian seberapa jauh fluktuasi harga beras mempengaruhi stabilitas ekonomi makro perlu menjadi perhatian, terutama pada kondisi pasar yang derajat liberalisasinya semakin meningkat.

Tujuan penelitian adalah (a) menganalisis pergerakan harga beras, baik di tingkat eceran maupun di tingkat pedagang besar, serta harga gabah di tingkat petani, serta (b) menganalisis pola *spread* antara harga gabah dan harga beras, baik antar waktu (*time series*) maupun antar wilayah (*spatial*).

Spread harga gabah dan beras dapat dipicu dari dua sisi, yaitu dari sisi harga gabah dan dari sisi harga beras. Analisis akan didahului dengan melihat pergerakan harga gabah, harga beras grosir dan eceran, baik di tingkat nasional maupun daerah, selanjutnya akan dilihat pula bagaimana pola *spread* harga gabah dan beras tersebut antar daerah di Indonesia.

II. KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

Dinamika jangka pendek harga komoditas pertanian di daerah konsumen pada umumnya memiliki pola yang sama dengan dinamika harga di daerah produsen karena permintaan yang dihadapi petani di daerah produsen merupakan turunan dari permintaan di daerah konsumen. Jika terjadi kenaikan harga di pasar konsumen akibat naiknya permintaan maka pedagang akan meneruskan kenaikan harga tersebut kepada

petani sehingga harga di pasar produsen juga mengalami peningkatan. Akan tetapi proses transmisi harga dari pasar konsumen ke pasar produsen tersebut umumnya tidak sempurna dan bersifat asimetris, artinya jika terjadi kenaikan harga di pasar konsumen maka kenaikan harga tersebut diteruskan kepada petani secara lambat dan tidak sempurna, sebaliknya jika terjadi penurunan harga. Pola transmisi harga seperti ini menyebabkan fluktuasi harga di pasar konsumen cenderung lebih tinggi dibanding fluktuasi harga di pasar produsen dan perbedaan fluktuasi harga tersebut akan semakin besar apabila transmisi harga yang terjadi semakin tidak sempurna (Simatupang, 1999).

Dalam pemasaran komoditas pertanian, transmisi harga dari pasar konsumen ke pasar produsen yang relatif rendah merupakan salah satu indikator yang mencerminkan adanya kekuatan monopsoni atau oligopsoni pada pedagang. Hal ini karena pedagang yang memiliki kekuatan monopsoni atau oligopsoni dapat mengendalikan harga beli dari petani sehingga walaupun harga di tingkat konsumen relatif tetap tetapi pedagang tersebut dapat menekan harga beli dari petani untuk memaksimumkan keuntungannya. Begitu pula jika terjadi kenaikan harga di tingkat konsumen maka pedagang dapat meneruskan kenaikan harga tersebut kepada petani secara tidak sempurna, dengan kata lain kenaikan harga yang diterima petani lebih rendah dibanding kenaikan harga yang dibayar konsumen. Pola transmisi harga seperti ini tidak menguntungkan bagi petani karena kenaikan harga yang terjadi di tingkat konsumen tidak sepenuhnya dapat dinikmati petani, sebaliknya jika terjadi penurunan harga.

Dalam jangka panjang harga komoditas cenderung naik akibat naiknya permintaan konsumen. Namun laju kenaikan harga di tingkat konsumen dapat berbeda dengan laju kenaikan harga di tingkat petani, dan tergantung kepada perilaku pedagang dalam melakukan transmisi harga dari konsumen kepada petani. Pada pasar yang bersaing pedagang akan meneruskan setiap kenaikan harga di tingkat konsumen dengan besaran yang relatif sama kepada petani, dengan kata lain kenaikan harga di tingkat konsumen relatif sama besar dengan kenaikan harga di tingkat petani. Tetapi pada pasar dengan kekuatan monopsoni atau oligopsoni kenaikan harga di tingkat petani akan lebih kecil dibanding kenaikan harga di tingkat konsumen akibat perilaku pedagang yang berusaha memaksimumkan keuntungannya dengan memberikan informasi harga yang tidak sempurna untuk menekan harga beli dari petani.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data deret waktu (*time series*) bulanan dari Januari 1998 sampai Mei 2008. Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai terbitan, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Urusan Logistik (Bulog), Departemen Pertanian, IRRI, FAO, USDA, dan sumber-sumber data lain.

Pergerakan harga gabah dan beras dianalisis dengan melihat perkembangan harga, baik harga nominal maupun riil. Harga riil diperoleh dengan membagi harga nominal dengan *Consumer Price Index* (CPI). Untuk pergerakan harga beras, akan

dilakukan analisis baik di tingkat eceran maupun di tingkat pedagang besar. Sementara untuk harga gabah, akan dilakukan analisis di tingkat petani, di daerah sentra produksi beras. Harga gabah yang digunakan adalah harga gabah kering panen (GKP), sementara harga beras grosir dan eceran yang digunakan adalah harga beras kualitas medium.

Stabilitas harga berasantar waktu dapat diukur dengan nilai koefisien variasi harga yang bersangkutan, sebagaimana ditunjukkan pada persamaan berikut:

$$CV = \frac{S}{\bar{X}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

dimana:

- CV = Koefisien variasi (%)
- S = Standar deviasi selama periode pengamatan (Rp/kg)
- \bar{X} = Rata-rata harga selama periode pengamatan (Rp/kg)

Pola *spread* harga gabah dan beras dianalisis dengan melihat perkembangan selisih harga riil beras dan gabah serta *growth* harga bulanannya. Selain itu, dianalisis juga volatilitas *spread* harga gabah dan beras antara periode sebelum dan sesudah status Perum Bulog. Pola volatilitas *spread* antar waktu diidentifikasi dengan menggunakan harga riil, yaitu harga nominal dibagi dengan CPI. Selain itu, pola *spread* secara spasial juga akan dianalisis untuk beberapa daerah di Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN

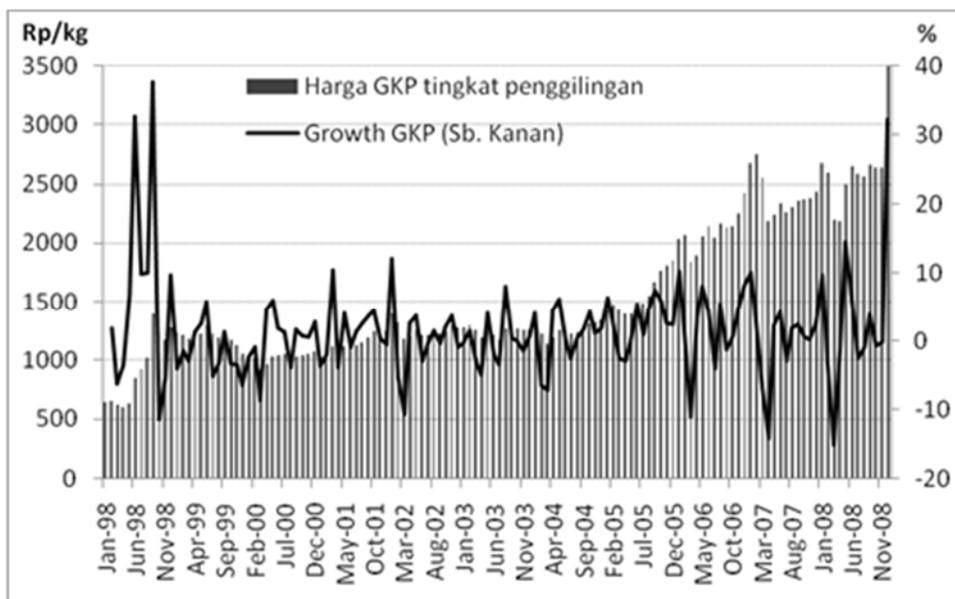
Pada bagian ini akan dipaparkan uraian mengenai pergerakan harga gabah dan beras, serta pola *spread* harga gabah dan beras di Indonesia, baik antar waktu (*time series*) maupun antar wilayah (*spatial*). Pergerakan harga gabah dan beras akan diuraikan mulai dari tingkat produsen (petani), tingkat pedagang besar (grosir), dan tingkat konsumen (eceran) pada periode Januari 1998 sampai dengan Desember 2008 (data bulanan). Sementara, pola *spread* harga akan dianalisis antara harga gabah dan harga beras eceran di beberapa daerah di Indonesia pada periode yang sama.

Pada dasarnya, petani selalu menghadapi persoalan klasik atas harga gabah yang dipasarkan. Pada masa panen raya, jumlah hasil panen meningkat sehingga mendorong harga di tingkat produsen turun. Pada saat itu, Bulog, sebagai lembaga yang bertugas untuk menjaga kestabilan harga beras, melakukan pembelian hasil petani. Tanpa ada tambahan penyerapan hasil panen melalui pengadaan Bulog tersebut, yang sekaligus sebagai instrumen harga dasar, harga produsen akan semakin tertekan.

Pergerakan harga gabah kering panen tingkat penggilingan di Indonesia pada periode Januari 1998 sampai dengan Desember 2008 menunjukkan tren yang meningkat (Gambar 2). Kenaikan harga bulanan tertinggi terjadi pada bulan September 1998 yaitu sebesar 37,57 persen, sementara penurunan harga tertinggi terjadi pada bulan Maret 2008 yaitu sebesar 15,12 persen. Jika dilihat dari koefisien

variasi (CV) antar tahun (Tabel 1), harga gabah kering panen sangat tidak stabil pada tahun 1998, yaitu sebesar 32,22 persen. Ini terkait dengan adanya krisis ekonomi dan musim kemarau yang panjang pada tahun tersebut. Ketidakstabilan harga gabah juga terjadi pada periode 2005 dan 2008, yaitu masing-masing sebesar 10,71 persen dan 12.34 persen. Ini terkait dengan kenaikan harga BBM pada tahun 2005 dan pengaruh krisis keuangan global pada tahun 2008. Namun, secara rata-rata, pergerakan harga GKP pada periode 1999-2008 jauh lebih stabil dibandingkan pada tahun 1998, yaitu sebesar 6,6 persen.

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis moneter, ekonomi, politik, dan sosial yang berkepanjangan. Bersamaan dengan itu terjadi berbagai perubahan yang mendasar dan secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap ekonomi perberasan nasional, antara lain adalah: (1) dicabutnya subsidi pupuk dan dibebaskannya tataniaga pupuk, (2) dibebaskannya impor beras oleh swasta, (3) dihapuskannya tarif impor beras yang kemudian ditetapkan tarif sebesar Rp 430.00 per kg, (4) dihapuskannya kredit program KUT (Kredit Usaha Tani) yang diubah menjadi kredit KKP (Kredit Ketahanan Pangan) yang menggunakan sistem eksekuting dan subsidi bunga, dan (5) bergulirnya desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, kemarau panjang dan bencana El Nino yang terjadi pada tahun 1998 menyebabkan produksi beras menurun, sehingga turut memperparah keadaan yang terjadi pada saat itu.



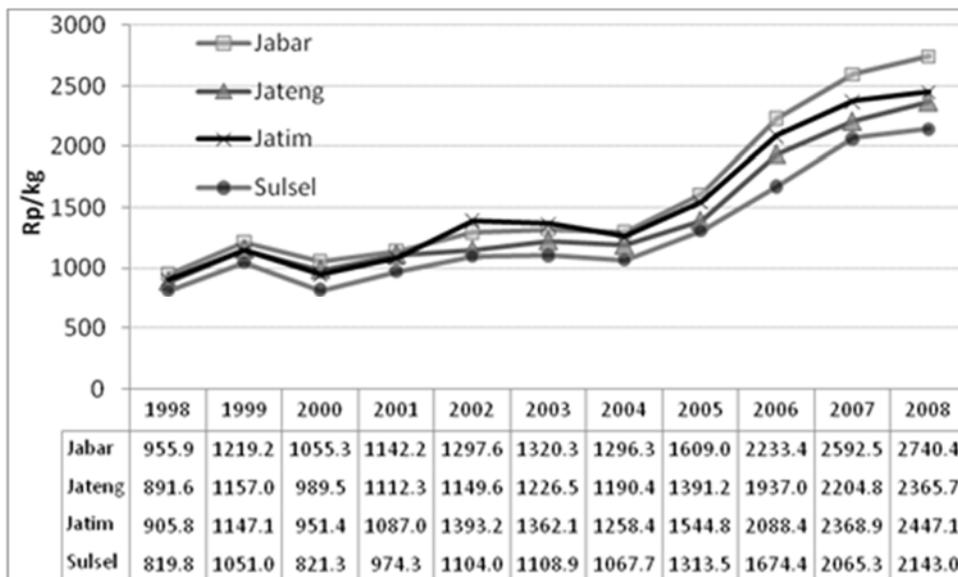
Gambar 2. Pergerakan Harga Gabah Kering Panen Tingkat Penggilingan di Indonesia, Januari 1998-Desember 2008

Tabel 1. Koefisien Variasi (CV) Harga Gabah Kering Panen (GKP) Tingkat Penggilingan di Indonesia, 1998-2008

Tahun	CV Nasional (%)
1998	32,22
1999	5,08
2000	3,93
2001	7,09
2002	4,79
2003	2,89
2004	4,79
2005	10,71
2006	7,29
2007	7,13
2008	12,34
rata-rata 1999-2008	6,60
Minimum	2,89
Maksimum	12,34
rata-rata 1999-2008	5,22
rata-rata 2003-2008	7,52

Pada saat Bulog masih berstatus sebagai LPND (1999-2002), ternyata pergerakan GKP lebih stabil dibandingkan saat Bulog berstatus sebagai Perum (2003-2008). Hal tersebut dapat dilihat dari koefisien variasi pada masing-masing periode yang diberikan pada Tabel 1. Pada periode 1999-2002, koefisien variasi untuk harga GKP adalah sebesar 5,22 persen, lebih stabil dibandingkan pada periode 2003-2008 yang sebesar 7,52 persen.

Pergerakan harga rata-rata gabah kering panen (GKP) tingkat penggilingan di empat provinsi sentra padi terbesar di Indonesia ditunjukkan pada Gambar 3. Harga GKP di Jawa Barat paling tinggi di antara provinsi lainnya, sementara harga GKP di Sulawesi Selatan adalah yang paling rendah. Pada tahun 1998-2003, harga GKP relatif stabil dan berada di bawah Rp 1.500 per kg, namun sejak 2004, harga GKP terus meningkat signifikan. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah yang terus menaikkan harga dasar gabah/harga pembelian pemerintah.

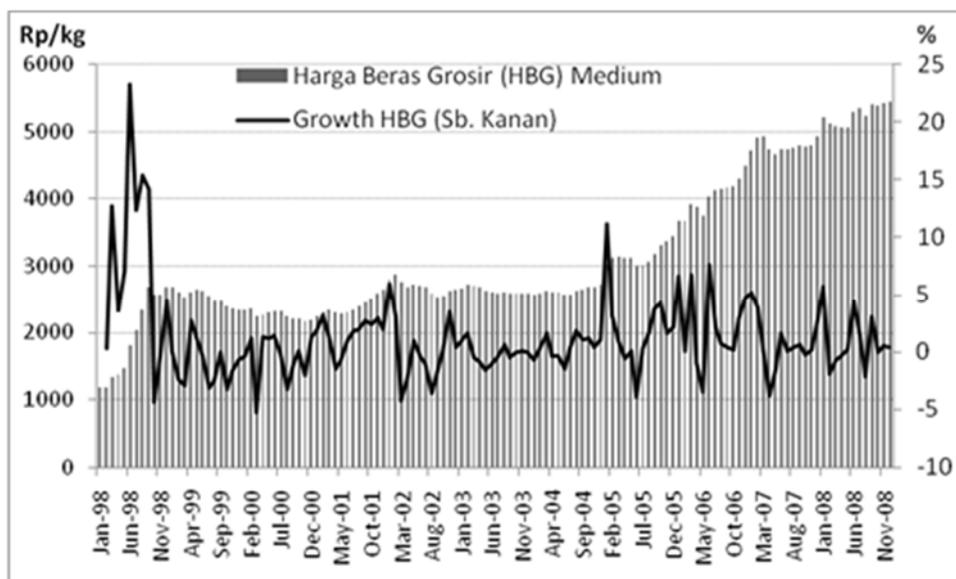


Gambar 3. Pergerakan Harga Rata-Rata Gabah Kering Panen Tingkat Penggilingan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, 1998 - 2008

3.1. Pergerakan Harga Tingkat Pedagang Besar/Grosir

Pergerakan harga beras medium tingkat pedagang besar/grosir di Indonesia pada periode Januari 1998 sampai dengan Desember 2008 menunjukkan tren yang meningkat (Gambar 4). Kenaikan harga tertinggi terjadi pada bulan Juni 1998 yaitu sebesar 23,57 persen, sementara penurunan harga tertinggi terjadi pada bulan Maret 2000 yaitu sebesar 5,22 persen. Penurunan harga yang terjadi di tingkat grosir tidak separah yang terjadi di tingkat petani. Ini berarti pedagang besar memiliki kekuatan yang lebih besar dalam menentukan harga beras.

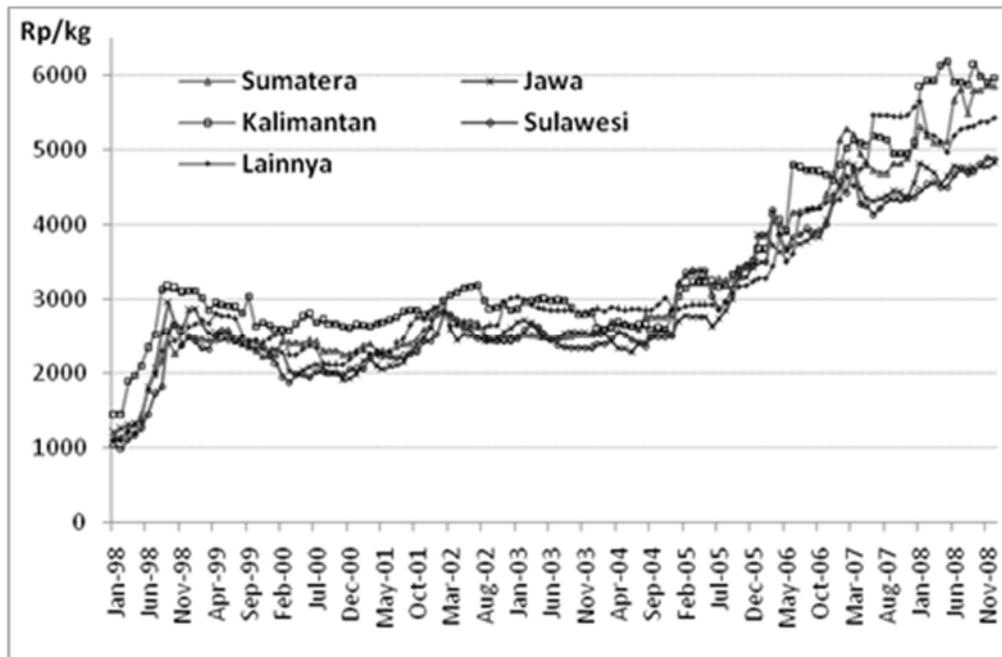
Jika dilihat dari koefisien variasi (CV) antar tahun (Tabel 2), harga beras medium grosir sangat tidak stabil pada tahun 1998, dengan koefisien variasi sebesar 31,82 persen. Ini terkait dengan adanya krisis ekonomi yang menyebabkan *buying panic*, serta musim kemarau panjang yang mengurangi produksi nasional pada tahun tersebut. Setelah periode 1998, harga beras medium di tingkat grosir relatif stabil, yaitu dengan rata-rata koefisien variasi sebesar 3,56 persen pada periode 1999-2008. Angka ini menunjukkan bahwa pergerakan harga di tingkat pedagang besar jauh lebih stabil dibandingkan fluktuasi harga yang terjadi di pasar gabah tingkat petani pada periode yang sama.



Gambar 4. Pergerakan Harga Beras Kualitas Medium Tingkat Pedagang Besar di Indonesia, Januari 1998-Desember 2008

Jika ditelaah menurut pulau di Indonesia, pergerakan harga beras grosir di beberapa pulau besar di Indonesia pada periode Januari 1998 sampai dengan Desember 2008 menunjukkan tren meningkat yang relatif sama (Gambar 5). Namun, harga beras grosir di pulau Kalimantan memiliki kecenderungan tingkat harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Ini bisa dimengerti, karena pulau Kalimantan bukan merupakan sentra produksi beras, sehingga pasokan berasnya diperoleh dari pulau Jawa, yang menyebabkan tingginya biaya transportasi dan akhirnya menyebabkan tingginya tingkat harga di wilayah tersebut.

Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2, variasi harga beras grosir di pulau-pulau besar di Indonesia pada tahun 1998 relatif tinggi. Krisis ekonomi pada saat itu mendorong kenaikan harga beras yang sangat tinggi dan mengakibatkan semua pulau mengalami gejolak harga yang sangat besar. Pulau Jawa dan Sulawesi mengalami ketidakstabilan harga beras grosir yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yaitu masing-masing sebesar 35,27 dan 37,74 persen. Sementara, variasi harga di pulau Kalimantan dan Sumatera lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, yaitu masing-masing sebesar 27,61 persen dan 29,51 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Bulog tidak mampu melakukan stabilisasi harga beras ketika terjadi gejolak harga yang meluas di seluruh wilayah Indonesia.



Gambar 5. Pergerakan Harga Beras Kualitas Medium Tingkat Pedagang Besar di Beberapa Pulau Besar di Indonesia, Januari 1998-Desember 2008

Secara umum, pada periode 1999 sampai dengan 2008, semua pulau rata-rata mengalami gejolak harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan gejolak harga nasional yang sebesar 3,56 persen. Secara rata-rata, harga beras grosir di pulau Kalimantan pada periode ini paling stabil, dengan koefisien variasi sebesar 3,90 persen, diikuti oleh pulau Sumatera (4,18 persen), Sulawesi (4,44 persen), dan Jawa (5,55 persen). Namun, jika dilihat dari koefisien variasi antar tahun, stabilitas harga di pulau Kalimantan paling berfluktuasi dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya, yaitu memiliki CV yang berkisar antara 1,92 persen sampai dengan 10,24 persen, diikuti dengan Jawa (antara 1,62 persen sampai dengan 9,22 persen), Sumatera (antara 0,99 persen sampai dengan 5,99 persen), dan Sulawesi (antara 2,48 persen sampai dengan 6,31 persen).

Sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, timbul tekanan yang sangat kuat agar peran pemerintah dikurangi secara drastis sehingga semua kepentingan nasional termasuk pangan harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Tekanan tersebut menyebabkan Bulog sebagai lembaga yang mengurus pangan nasional perlu melakukan perubahan status hukum agar menjadi lembaga yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Puncaknya, pada Januari 2003, Bulog secara resmi berubah status dari Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi Perusahaan Umum (Perum). Perubahan status ini menimbulkan

kontroversi di kalangan masyarakat, karena Bulog akan menjalankan dua fungsi bersamaan, yaitu fungsi publik dan fungsi komersial. Jika dilihat tingkat volatilitas harga beras di tingkat pedagang besar yang ditunjukkan oleh nilai CV pada Tabel 3, ternyata harga beras bulanan lebih sering berfluktuasi pada era Bulog sebagai LPND dibandingkan pada era Bulog sebagai Perum. Selama periode 1999-2002, rata-rata nilai CV nasional sebesar 4,08 persen, sedangkan tahun 2003-2008 sebesar 3,21 persen. Jika dilihat menurut pulau, hanya pulau Kalimantan dan Sulawesi yang harga beras grosir lebih stabil pada periode LPND Bulog (1999-2002) dibandingkan selama periode Perum Bulog (2003-2008), namun itupun tidak terlalu signifikan perbedaannya.

Tabel 2. Koefisien Variasi (CV) Harga Beras Grosir di Beberapa Pulau Besar di Indonesia, 1998-2008

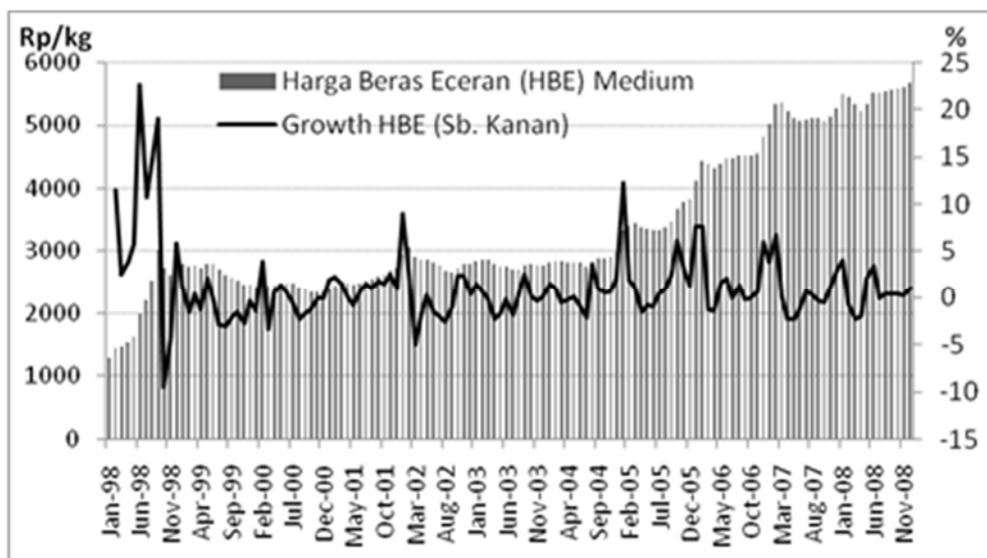
Tahun	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Lainnya	Nasional
1998	29,51	35,27	27,61	37,74	34,19	31,82
1999	5,00	6,81	5,46	3,32	5,99	4,50
2000	3,35	6,14	2,49	3,11	6,62	2,69
2001	4,71	8,49	3,17	5,18	8,80	5,40
2002	5,38	6,79	4,28	5,79	5,45	3,73
2003	0,99	3,25	2,80	5,10	2,40	1,82
2004	3,40	4,17	2,10	2,48	1,78	1,93
2005	3,08	9,22	4,22	6,21	4,53	4,58
2006	5,78	5,22	10,24	6,31	10,98	6,33
2007	4,13	3,78	2,32	3,70	9,02	1,78
2008	5,99	1,62	1,92	3,18	3,25	2,81
rata-rata 1999-2008	4,18	5,55	3,90	4,44	5,88	3,56
minimum	0,99	1,62	1,92	2,48	1,78	1,78
maksimum	5,99	9,22	10,24	6,31	10,98	6,33
rata-rata 1999-2002	4,61	7,06	3,85	4,35	6,71	4,08
rata-rata 2003-2008	3,89	4,55	3,93	4,50	5,33	3,21

3.2. Pergerakan Harga Tingkat Eceran

Secara umum, pergerakan harga beras eceran kualitas medium di Indonesia pada periode Januari 1998 sampai dengan Desember 2008 menunjukkan tren meningkat (Gambar 6) Krisis ekonomi dan musim kemarau panjang pada tahun 1997-1998 mengakibatkan rendahnya produksi beras nasional yang akhirnya mendorong kenaikan signifikan harga beras nasional rata-rata di tingkat konsumen dari Rp 1.290,04 pada Januari 1998 menjadi Rp 3.009,71 pada September 1998 (atau meningkat sebesar 133,3 persen). Selain itu krisis ekonomi 1997 diikuti dengan

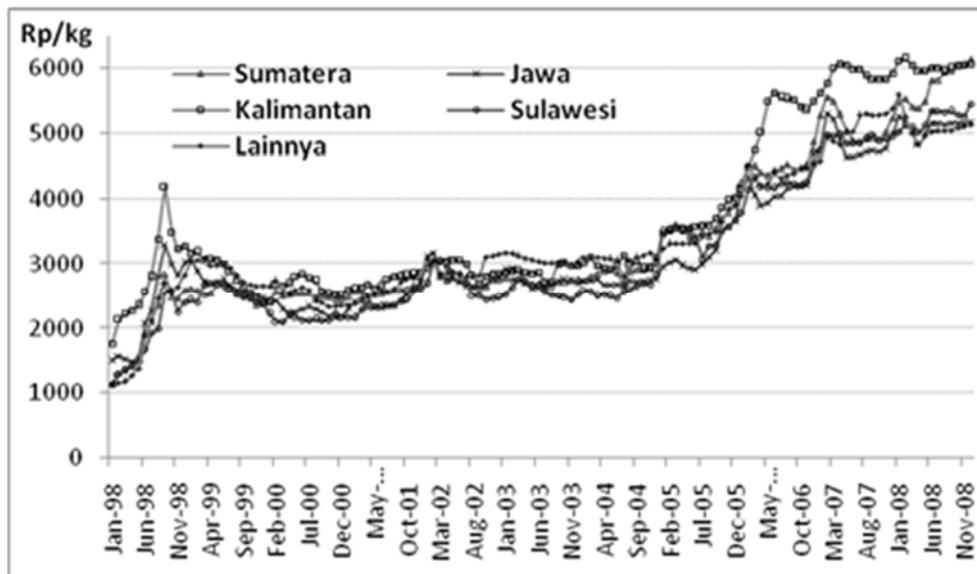
komitmen perubahan kebijakan ekonomi beras atas dorongan lembaga internasional (seperti IMF dan World Bank), sehingga penopang paket kebijakan ekonomi beras yang telah diperasionalkan pada era orde baru runtuh satu persatu. Di antaranya adalah pencabutan monopoli impor beras yang dimiliki Bulog, penghapusan dana KLBI bagi Bulog untuk pembelian gabah/beras petani, dan penghapusan berbagai subsidi input.

Sementara pada periode Januari 1999 sampai dengan Desember 2004, pergerakan harga relatif stabil, hal ini ditunjukkan oleh variasi harga nasional yang terjadi (CV) berkisar antara 1,96 persen sampai dengan 4,98 persen. Nilai CV ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 1998 yang mencapai 29,31 persen. Koefisien variasi atau *coefficient of variance* (CV) adalah nilai perbandingan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata hitung dari suatu distribusi. Semakin besar nilai koefisien variasi berarti datanya kurang merata (heterogen), jika semakin kecil koefisien variasi berarti data merata (homogen). Selanjutnya, pada periode Desember 2004 sampai dengan Desember 2008, harga beras eceran kembali meningkat, namun peningkatannya tidak sehebat seperti tahun 1998. Harga beras meningkat dari Rp 2971,70 pada Desember 2004 menjadi Rp 5.660,36 pada Desember 2008 (atau meningkat sebesar 90,5 persen). Kenaikan harga BBM dan kenaikan harga beras internasional merupakan beberapa faktor yang memicu kenaikan harga beras nasional pada periode ini. Gejolak harga beras domestik yang terjadi pada tahun 2008 tidak separah yang terjadi di Internasional. Pada tahun 2008, produksi dalam negeri meningkat tajam, Indonesia tidak melakukan impor beras, sehingga ketergantungan harga beras domestik terhadap harga beras internasional dapat diatasi. Hal ini tidak lepas dari peran Bulog yang berhasil mengoptimalkan pengadaan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan stoknya melalui produksi dalam negeri yang melimpah. Produksi tahun 2008 mencapai 60,3 juta ton GKG atau sekitar 38 juta ton setara beras. Dari total tersebut, sekitar 8,41 persen dari total produksi tersebut berhasil diserap Bulog. Realisasi pengadaan Bulog mencapai 3,2 juta ton naik secara signifikan sebesar 81 persen dibandingkan pengadaan tahun 2007, sehingga kebutuhan untuk stok dalam negeri tahun 2008 sepenuhnya dapat dipenuhi dari pengadaan dalam negeri. Jumlah pengadaan 3,2 juta ton tersebut diperoleh Bulog di tengah lonjakan harga beras dunia dan diakui mampu menstabilkan harga beras domestik.



Gambar 6. Pergerakan Harga Beras Kualitas Medium Tingkat Eceran di Indonesia, Januari 1998-Desember 2008

Jika ditelaah menurut pulau di Indonesia, pergerakan harga beras eceran di beberapa pulau besar di Indonesia pada periode Januari 1998 sampai dengan Desember 2008 menunjukkan tren meningkat yang relatif sama (Gambar 7). Namun, harga beras eceran pulau Kalimantan memiliki kecenderungan lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras eceran di pulau-pulau lainnya. Bahkan, pada periode Agustus 2005 sampai dengan Agustus 2006, harga beras eceran di pulau Kalimantan meningkat sebesar 53,6 persen, sementara di pulau-pulau lainnya hanya mengalami peningkatan antara 29 persen sampai dengan 34,3 persen. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3, variasi harga beras eceran di pulau-pulau besar di Indonesia pada tahun 1998 relatif tinggi. Krisis ekonomi pada saat itu mendorong kenaikan harga beras yang sangat tinggi dan mengakibatkan semua pulau mengalami gejolak harga yang sangat besar. Pulau Jawa dan Sumatera mengalami ketidakstabilan harga beras eceran yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yaitu masing-masing sebesar 31,75 dan 30,11 persen. Sementara, variasi harga di pulau Kalimantan dan Sulawesi lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, yaitu masing-masing sebesar 25,37 persen dan 27,93 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Bulog tidak mampu melakukan stabilisasi harga beras ketika terjadi perubahan iklim (kekeringan) yang meluas di seluruh wilayah Indonesia.



Gambar 7. Pergerakan Harga Beras Kualitas Medium di Tingkat Eceran, di Beberapa Pulau Besar di Indonesia, Januari 1998-Desember 2008

Secara umum, pada periode 1999 sampai dengan 2008, semua pulau rata-rata mengalami gejolak harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan gejolak harga nasional yang sebesar 3,26 persen. Harga beras eceran di pulau Kalimantan pada periode ini paling tidak stabil, dengan nilai CV berkisar antara 1,02 persen sampai dengan 9,94 persen, diikuti dengan Sulawesi (antara 1,56 persen sampai dengan 8,64 persen), Jawa (antara 1,42 persen sampai dengan 8,46 persen), dan Sumatera (antara 1,57 persen sampai dengan 4,84 persen).

Sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, timbul tekanan yang sangat kuat agar peran pemerintah dikurangi secara drastis sehingga semua kepentingan nasional termasuk pangan harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Tekanan tersebut menyebabkan Bulog sebagai lembaga yang mengurus pangan nasional perlu melakukan perubahan status hukum agar menjadi lembaga yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Puncaknya, pada Januari 2003, Bulog secara resmi berubah status dari Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi Perusahaan Umum (Perum). Perubahan status ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, karena Bulog akan menjalankan dua fungsi bersamaan, yaitu fungsi publik dan fungsi komersial. Namun, jika dilihat tingkat volatilitas harga beras di tingkat pengecer yang ditunjukkan oleh nilai CV pada Tabel 3, ternyata harga beras bulanan lebih sering berfluktuasi pada era Bulog sebagai LPND dibandingkan pada era Bulog sebagai Perum. Selama periode 1999-2002, rata-rata nilai CV nasional sebesar 3,81 persen, sedangkan tahun 2003-2008 sebesar 2,90

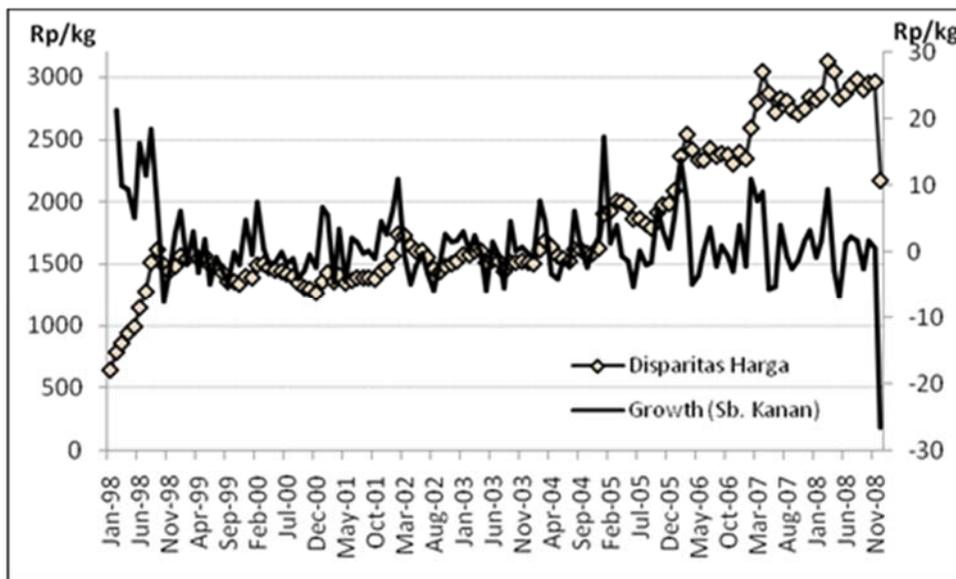
persen. Jika dilihat menurut pulau, hanya pulau Sumatera saja yang harga beras di tingkat pengecer lebih stabil pada periode LPND Bulog (1999-2002) dibandingkan selama periode Perum Bulog (2003-2008), itupun tidak terlalu signifikan perbedaannya.

Tabel 3. Koefisien Variasi (CV) harga beras kualitas medium tingkat eceran di berbagai pulau di Indonesia, 1998-2008.

Tahun	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Lainnya	Nasional
1998	30,11	31,75	25,37	27,93	35,59	29,31
1999	4,35	6,40	9,94	4,86	5,76	4,98
2000	1,99	3,92	5,10	2,16	5,53	2,35
2001	2,33	5,45	3,76	5,86	5,70	3,93
2002	4,81	6,17	4,40	8,64	4,79	3,98
2003	1,57	4,00	3,41	3,95	2,06	1,96
2004	3,15	1,42	2,56	3,92	2,96	1,99
2005	4,39	8,46	5,09	4,82	6,51	5,19
2006	3,27	4,13	9,31	4,84	3,21	3,71
2007	4,79	4,64	2,25	1,56	4,96	2,21
2008	4,84	2,26	1,02	2,72	3,68	2,34
rata-rata 1999-2008	3,55	4,69	4,69	4,33	4,52	3,26
minimum	1,57	1,42	1,02	1,56	2,06	1,96
maksimum	4,84	8,46	9,94	8,64	6,51	5,19
rata-rata 1999-2002	3,37	5,49	5,80	5,38	5,45	3,81
rata-rata 2003-2008	3,67	4,15	3,94	3,64	3,90	2,90

3.3. Pola *Spread* Harga Antar Waktu

Pola *spread* antara harga gabah kering panen (GKP) dan harga beras medium eceran di Indonesia diberikan pada Gambar 8. Gambar tersebut menunjukkan bahwa *spread* harga nominal memiliki tren yang meningkat pada periode Januari 1998 sampai dengan Desember 2008. Selain itu, pertumbuhannya sangat tidak stabil, pada masa-masa panen raya (Maret-Mei) harga meningkat cukup tinggi, sementara pada masa-masa paceklik harga menurun sangat drastis.



Gambar 8. Pola *Spread* antara Harga Gabah Kering Panen dan Harga Beras Eceran di Indonesia, Januari 1998-Desember 2008

Kenaikan *spread* harga tertinggi terjadi pada bulan Februari 1998 yaitu sebesar 21,26 persen, sementara penurunan gap harga tertinggi terjadi pada bulan Desember 2008 yaitu sebesar 26,72 persen. Jika dilihat dari koefisien variasi (CV) antar tahun (Tabel 4), *spread* harga gabah dan eceran sangat tidak stabil pada tahun 1998, yaitu sebesar 28,06 persen. Ini terkait dengan adanya krisis ekonomi dan musim kemarau yang panjang pada tahun tersebut. Secara rata-rata, gap harga pada periode 1999-2008 jauh lebih stabil dibandingkan pada tahun 1998, yaitu sebesar 4,95 persen. Pada periode ini, pergerakan *spread* harga yang paling stabil terjadi pada tahun 2001, yaitu sebesar 2,66 persen, sementara pergerakan harga yang paling tidak stabil (*volatile*) terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 8,27 persen.

Pergerakan *spread* harga GKP dan beras pada saat Bulog berstatus sebagai Perum (2003-2008) ternyata lebih stabil dibandingkan saat Bulog berstatus sebagai LPND (1999-2002). Hal tersebut dapat dilihat dari koefisien variasi pada masing-masing periode yang diberikan pada Tabel 4. Pada periode 2003-2008, koefisien variasi untuk *spread* harga adalah sebesar 4,82 persen, lebih stabil dibandingkan pada periode 1999-2002 yang sebesar 5,15 persen.

Tabel 4. Koefisien Variasi (CV) *Spread* Harga Gabah Kering Panen (GKP) dan Harga Beras Medium Eceran di Indonesia, 1998-2008

Tahun	CV Nasional (%)
1998	28,06
1999	6,22
2000	5,52
2001	2,66
2002	6,20
2003	3,05
2004	3,31
2005	3,63
2006	4,51
2007	6,13
2008	8,27
rata-rata 1999-2008	4,95
minimum	2,66
maksimum	8,27
rata-rata 1999-2002	5,15
rata-rata 2003-2008	4,82

3.4. *Spread* Harga Antar Wilayah

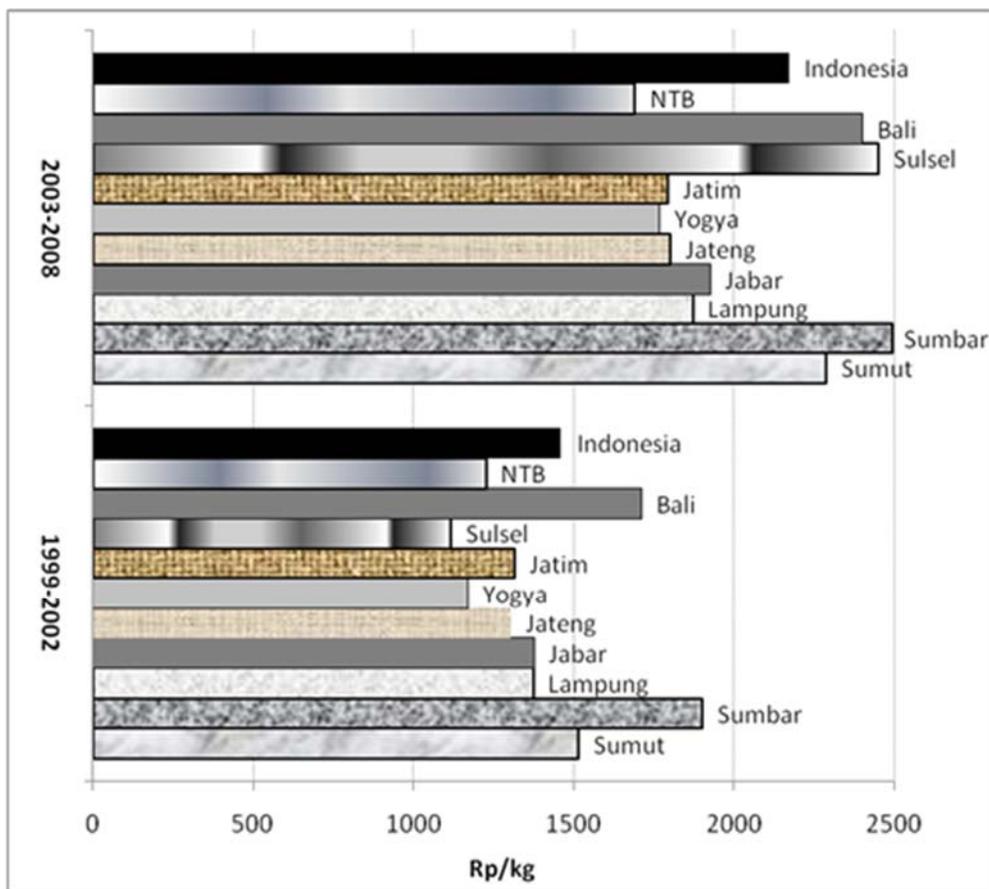
Produksi padi pada prinsipnya tergantung dari luas lahan dan produktivitasnya. Sementara, produktivitas itu sendiri sangat dipengaruhi oleh benih padi, penggunaan pupuk berimbang, kesuburan tanah, dan curah hujan. Wilayah yang memiliki tingkat kesuburan tanah serta curah hujan yang tinggi akan berpotensi menghasilkan produksi padi yang tinggi. Karena wilayah Indonesia memiliki tingkat kesuburan tanah dan curah hujan yang bervariasi, maka tingkat produksi padi juga bervariasi antar wilayah. Selama ini produksi padi masih didominasi wilayah Jawa. Menurut BPS, pada 2007 pulau Jawa berkontribusi sebesar 53,3 persen terhadap produksi beras nasional.

Produksi padi Indonesia yang tidak merata antar wilayah tersebut, sementara tingkat konsumsi beras terus meningkat setiap tahun di setiap wilayah. Sebagai konsekuensinya terdapat wilayah-wilayah yang mampu dan tidak mampu menyediakan beras untuk wilayahnya sendiri. Atau dengan kata lain, ada daerah surplus dan defisit beras. Kondisi ini akan membuat perbedaan harga beras dari suatu wilayah ke wilayah lainnya atau dari daerah surplus ke daerah yang defisit beras.

Pergerakan pola *spread* nominal antara harga gabah kering panen (GKP) dan harga beras medium eceran di beberapa provinsi di Indonesia diberikan pada Gambar 9. Pada periode 1999-2002, yaitu masa saat Bulog memiliki status sebagai LPND, *spread* nominal terbesar terjadi di Sumatera Barat, sementara *spread* nominal yang

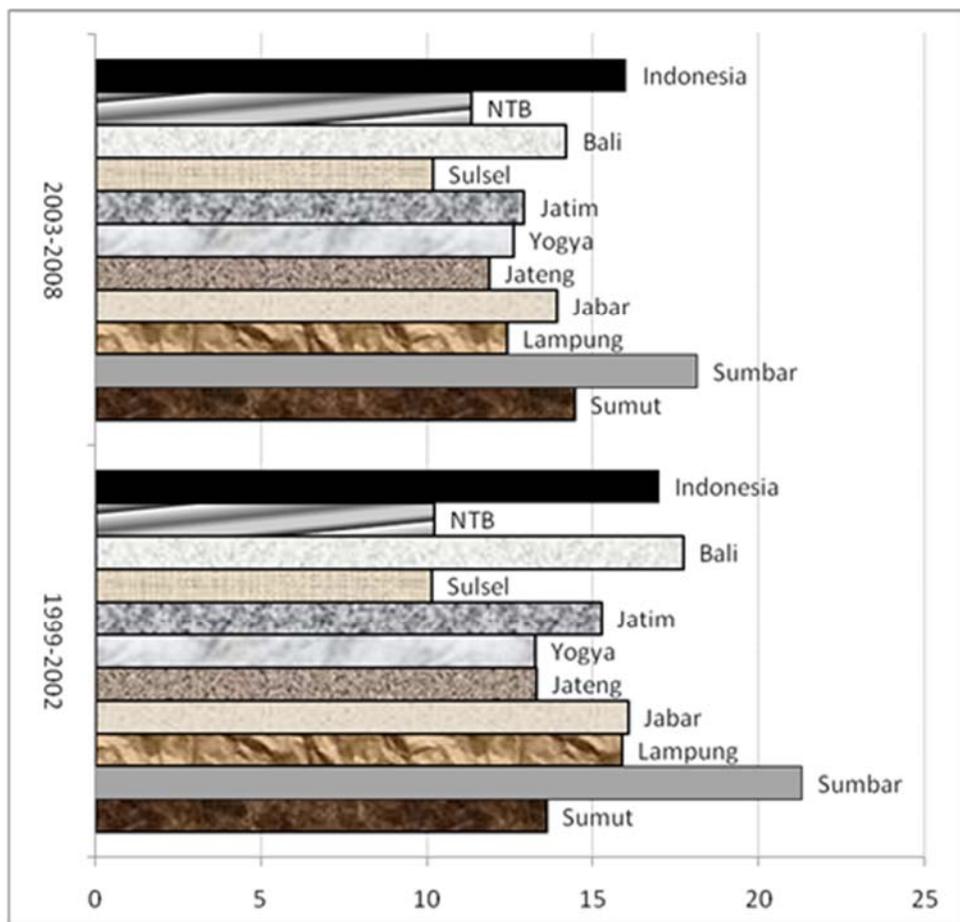
terendah terjadi di Sulawesi Selatan. Ada tiga provinsi yang memiliki gap harga nominal lebih tinggi daripada *spread* harga rata-rata nasional, yaitu Bali, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sementara, provinsi lainnya, yang didominasi oleh pulau Jawa, memiliki *spread* harga nominal lebih rendah daripada rata-rata nasional. Pada periode ini, *spread* harga nominal di provinsi sentra produksi beras, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan, relatif lebih rendah dibandingkan dengan *spread* harga nominal dari provinsi non sentra produksi beras.

Pada saat Bulog berstatus sebagai Perum, yaitu periode 2003-2008, *spread* harga nominal di Sulawesi Selatan meningkat secara signifikan, bahkan jauh melampaui rata-rata nasional, dan semua pulau Jawa.



Gambar 9. Pola *Spread* Harga Nominal Gabah dan Beras Eceran di Beberapa Provinsi di Indonesia, Periode 1999-2002 dan Periode 2003- 2008

Kestabilan *spread* harga antar wilayah dapat dilihat dari *spread* harga riilnya, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 10. Pada periode LPND Bulog (1999-2002), *spread* harga riil di Sumatera Barat dan Bali lebih tinggi daripada *spread* harga riil rata-rata nasional. Sementara pada periode Perum Bulog (2003-2008), hanya Sumatera Barat saja yang kestabilan *spread* harga riilnya masih tinggi dibandingkan rata-rata secara nasional. Namun kondisi ini masih jauh lebih baik, karena *spread* harga riil di Sumatera Barat lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jika diperhatikan lebih seksama, semua provinsi, kecuali Bali, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, mengalami perbaikan ketika Bulog berstatus sebagai Perum, hal ini dapat dilihat dari harga riil yang lebih rendah pada periode 2003-2008.



Gambar 10. Pola *Spread* Harga Riil Gabah dan Beras Eceran di Beberapa Provinsi di Indonesia, Periode 1999-2002 dan Periode 2003- 2008

IV. KESIMPULAN

Dari hasil analisis perkembangan harga gabah dan beras di Indonesia dapat disimpulkan bahwa fluktuasi yang terjadi pada harga beras grosir dan harga beras eceran lebih kecil dibandingkan dengan fluktuasi yang terjadi pada harga gabah. Lebih jauh, volatilitas harga beras eceran dan grosir di berbagai pulau di Indonesia menunjukkan bahwa harga lebih sering berfluktuasi pada saat Bulog menjalankan fungsinya sebagai LPND daripada setelah berstatus sebagai Perum. Namun hal sebaliknya terjadi pada harga gabah nasional, yaitu harga lebih stabil pada saat Bulog menjalankan fungsinya sebagai LPND daripada setelah berstatus sebagai Perum.

Ini menunjukkan bahwa kebijakan perberasan yang dilakukan pemerintah lebih berpihak kepada konsumen. Pemerintah lebih khawatir terhadap kenaikan harga beras di tingkat konsumen daripada turunnya harga gabah di tingkat petani. Instrumen kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meredam gejolak harga beras di tingkat konsumen meliputi subsidi kepada masyarakat miskin dan operasi pasar, sementara instrumen kebijakan untuk meredam turunnya harga gabah adalah penerapan harga pembelian pemerintah (HPP) dan operasi pembelian gabah di mana pembelian disesuaikan dengan kebutuhan, yang seringkali tidak efektif. Kondisi ini diperparah oleh sifat harga gabah yang musiman atau jangka pendek, sementara fluktuasi harga beras bersifat tahunan atau jangka panjang.

Dari hasil analisis pola *spread* antara harga gabah dan beras di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pola *spread* nominal secara nasional maupun antar wilayah terus meningkat dari waktu ke waktu, namun fluktuasinya lebih baik ketika Bulog berfungsi sebagai Perum (2003-2008) daripada saat berfungsi sebagai LPND (1999-2002).

DEPARTEMEN AGRIBISNIS
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
JL. KAMPER, WING 4 LEVEL 5, KAMPUS IPB DRAMAGA BOGOR
TELP (0251) 8629654

